

Pengaruh Sistem Pelaporan Keuangan, Pendidikan dan Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Muhammad Randa Maulid¹, Linda^{2*}, Gamal Batara³, Raida Fuadi⁴

^{1,2,3,4}Universitas Syiah Kuala Aceh

¹maulidranda@gmail.com; ²lindarisyard@unsyiah.ac.id;

³gbatara@unsyiah.ac.id; ⁴raida.fuadi@unsyiah.ac.id

^{*}Penulis korespondensi

Abstract

This study aims to analyze the effect of the use of SIMDA – local government management information system, government staff education level, and work experience on the quality of local government financial reports at SKPK (Working Units) in Aceh Jaya District. The population in this study is the ASN (Civil Servants) at SKPK (working units) in Aceh Jaya District, which consists of 43 SKPK. Samples consist of the Head of Finance Division and one of his/her staff from each SKPK. This study found the use of SIMDA and government staff education level do not affect the quality of financial report, while work experience affects the quality of financial report. They face many obstacles on using SIMDA and addition, only 39% of respondents have accounting education background. This shows that the work experience of ASN Aceh Jaya regency is very helpful in improving the quality of financial reports.

Keywords: Local Government, Financial Report Quality, Education Level, Work Experience

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) Keuangan, Tingkat Pendidikan, dan Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada SKPK (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Aceh Jaya. Populasi dalam penelitian ini adalah ASN (Aparatur Sipil Negara) SKPK Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang terdiri dari 43 SKPK. Sampel pada penelitian ini adalah Kasubag (Kepala Subbagian) Keuangan dan satu stafnya. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel penerapan SIMDA Keuangan dan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hanya variabel pengalaman kerja yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Mereka menghadapi banyak kendala dalam menggunakan SIMDA dan selain itu hanya 39% responden yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Hal ini menunjukkan pengalaman kerja ASN Kabupaten Aceh Jaya sangatlah membantu dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Kualitas Laporan Keuangan, Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja

PENDAHULUAN

Pelaporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Indonesia masih memerlukan perhatian dan perbaikan sejalan dengan waktu menuju kesempurnaan. Pelaporan keuangan haruslah memenuhi peraturan yang berlaku, sehingga penyimpangan ataupun penemuan yang ditemukan oleh BPK-RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) dapat diminimalisir. Menurut Kepala BPK-RI (Bpk.go.id, 2011) bahwa sebanyak 326 pemerintah daerah atau 91% dari 358 pemerintah daerah yang laporan keuangannya diaudit oleh BPK-RI diberikan pendapat yang buruk, hanya 32 pemerintah daerah mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, hingga pada tahun 2020, di masa pandemi COVID-19, laporan keuangan terus membaik. Terdapat 486 dari 542 pemerintah daerah atau 89,7 persen memperoleh opini audit WTP, yaitu 33 provinsi, 88 pemerintah kota, dan 365 pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, menyampaikan terima kasih kepada Ketua BPK beserta wakilnya, anggota BPK, dan juga auditor BPK, karena mereka terus melakukan pengawasan dan menjaga akuntabilitas publik dari pengguna uang negara dalam menangani krisis pada masa pandemi COVID-19 (Yovanda, 2021).

Di Provinsi Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Jaya, yang merupakan salah satu kabupaten di Aceh, pada tahun 2018, merupakan salah satu Kabupaten/Kota urutan ketiga tercepat yang menyerahkan laporan keuangan ke BPK RI Perwakilan Aceh di Banda Aceh. Bupati Aceh Jaya, Drs. H. T. Irfan TB, menceritakan ini merupakan apresiasi kami kepada seluruh SKPK yang sudah proaktif dalam menyampaikan data informasi keuangan kepada Tim Audit BPK RI Perwakilan Aceh (Acehprov.go.id, 2018). Selain itu, kabupaten Aceh Jaya juga sudah menerima WTP ke-8 berturut-turut pada tahun anggaran 2020 (Acehjayakab.go.id, 2021).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan tentang karakteristik-karakteristik kualitatif keuangan pernyataan pemerintah yaitu prasyarat normatif diperlukan dalam laporan keuangan pemerintah sehingga memenuhi kualitas yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan, dan dimengerti. Salah satu faktor pendukung dalam memproduksi laporan keuangan berkualitas tinggi adalah sistem informasi akuntansi, karena dengan menggunakan sistem informasi akuntansi maka laporan keuangan dihasilkan akan memenuhi standar peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dengan syarat proses penginputannya baik, tidak keliru (*human error*). Teknologi informasi terus berkembang seiring zaman yang terus maju membuat sebagian dari dukungan berbagai kegiatan ikut juga berkembang, salah satunya di sektor pemerintah, yakni entitas yang diharapkan bisa menjadi ekonomis, efektif, efisien, dengan tata kelola yang lebih baik lagi sesuai dengan harapan pemerintah, khususnya pemerintah daerah dalam melahirkan pemerintahan yang baik. Berbagai usaha pemerintah daerah dalam mewujudkan itu, salah satunya adalah dengan membuat informasi teknologi di bidang keuangan atau akuntansi untuk pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik lagi. Pemerintah menggunakan teknologi informasi dalam bentuk *software* akuntansi atau aplikasi manajemen keuangan yang dikembangkan oleh pemerintah pusat, di antaranya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang diluncurkan oleh KEMENDAGRI pada tahun 2019 (Kemendagri.go.id, 2019),

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan yang dikembangkan oleh BPKP pada tahun 2006 (<http://www.bpkp.go.id>) dan beberapa aplikasi yang dikembangkan oleh sektor swasta.

Salah satu penerapan kemajuan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tata kelola keuangan daerah adalah dengan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah yaitu menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Dengan menggunakan aplikasi SIMDA diharapkan bisa membuat pengelolaan keuangan daerah secara akuntabilitas dan transparan (Tegela, 2014)

Tidak semua orang bisa menggunakan aplikasi khusus untuk membantunya dalam mencapai suatu tujuan, contohnya menggunakan aplikasi pengelola laporan keuangan, seperti SIMDA Keuangan. Sebelum menggunakan aplikasi, seseorang harus mempelajari seluk beluk dari aplikasi tersebut. Dengan tingkat Pendidikan yang semakin tinggi, maka semakin mudah juga dia menguasai aplikasi. Menurut UU RI Nomor 20 2003 tentang Pendidikan Nasional, tingkat pendidikan atau biasanya disebut dengan jenjang pendidikan yaitu tahapan pendidikan didasarkan sesuai tingkat perkembangan siswa, tujuan yang ingin dicapai, dan kemampuan untuk berkembang. Tingkat pendidikan formal termasuk pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, tingkat pendidikan dapat dijadikan sebagai indikator tingkat kecerdasan seseorang. Adanya hubungan positif antara tingkat pendidikan dengan pengetahuan dan kecerdasan seseorang, maka dari itu semakin mahir juga seseorang tersebut dalam membuat laporan keuangan yang berkualitas memenuhi standar peraturan. karena orang tersebut sudah memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih dibandingkan dengan seseorang yang baru saja terjun ke akuntan tanpa memiliki gelar pendidikan (Wungow et al., 2016).

Seseorang yang memiliki pengalaman luas akan terlihat mudah untuk berkomunikasi dan bekerja sama baik dalam organisasi profit maupun non profit. Oleh karenanya orang yang berpengetahuan akan mudah diterima di lingkungan kerja manapun, sehingga membuat mereka lebih berpengalaman, karena banyaknya pekerjaan yang diperoleh. Indikator pengalaman kerja, yaitu lamanya masa kerja seseorang dalam memahami dan melaksanakan tugasnya di dunia kerja (Muzahid, 2014).

Semakin lama jangka waktu seorang karyawan bekerja dalam sebuah organisasi, maka semakin berpengalaman karyawan tersebut dalam mendalami dan mengambil kebijakan-kebijakan masalah-masalah yang dihadapi. Perihal ini didukung oleh riset yang dilakukan oleh Muzahid (2014), yang hasil penelitiannya menunjukkan pengalaman kerja berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Saat ini di Kabupaten Aceh Jaya masih menggunakan SIMDA dalam membuat Laporan Keuangan Daerah, sedangkan beberapa kabupaten/kota di Provinsi Aceh telah menggunakan SIPD sejak tahun 2020. Penggunaan SIMDA tetap masih memberikan kontribusi yang bagus untuk Kabupaten Aceh Jaya, yaitu perolehan predikat WTP untuk laporan keuangan daerahnya. Sebelumnya Kabupaten Aceh Jaya sempat menggunakan aplikasi sistem informasi manajemen yang dikontrak ratusan juta per tahun pada pihak swasta akan tetapi hasil

laporan keuangannya tidak bisa diandalkan, dengan opini hasil LKPD yang di dapat WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Kemudian pada tahun 2010 - sekarang, Aceh Jaya menggunakan SIMDA. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai BPKK Aceh Jaya, di tahun pertama menggunakan SIMDA, hasil laporan keuangannya bisa diandalkan, lalu hasil opininya WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Selain pernah tercepat pengumpulannya, Aceh Jaya juga sudah mendapat 8 kali opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) secara berturut-turut (Acehjayakab.go.id, 2021).

Laporan keuangan mencerminkan kemampuan untuk mengetahui apakah pemerintah berfungsi dengan baik, yang mengharuskan pemerintah untuk memberikan laporan keuangan yang berkualitas. Pemerintah daerah sebagai pengelola dana masyarakat harus dapat memberikan informasi keuangan dibutuhkan secara akurat, tepat waktu, relevan dan dapat diandalkan sehingga dituntut memiliki pengelolaan yang profesional (Anggadini et al., 2021) Oleh karena itu, keberadaan sebuah sistem akuntansi dan sumber daya manusia yang memadai dalam menjalankan sebuah sistem menjadi sangat penting karena fungsinya dalam menentukan kualitas informasi pada laporan keuangan.

Keberadaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) adalah suatu sistem yang bisa menolong manajemen untuk mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis data evaluasi dan menyajikannya dalam batas-batas informasi yang berharga dan akhirnya sampai pada keputusan di mana informasi tersebut berguna untuk mendukung operasional fungsi manajemen (Machmud, 2013).

Badan Pengawas Pemeriksa Keuangan (BPKP) telah mengembangkan *software* Sistem Informasi Manajemen Daerah yang dikenal dengan SIMDA. SIMDA adalah sistem yang berbasis teknologi yang telah banyak digunakan oleh pemerintah daerah di Indonesia dalam penyampaian laporan keuangan di daerahnya (Budiman & Arza, 2013). Melalui penggunaan SIMDA ini diharapkan dapat mempermudah pengelolaan keuangan daerah pada lingkungan Organisasi Badan Wilayah (OPD) yang dikembangkan dengan menggunakan penerapan sistem pengendalian internal pemerintahan (SPIP). Oleh karenanya penguasaan aplikasi SIMDA ini haruslah maksimal agar dapat diimplementasikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sehingga menghasilkan LKPD sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Output yang dihasilkan dari SIMDA ini, di antaranya (a) Akuntansi dan pelaporan, (b) Penganggaran, dan (c) Penatausahaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gunadi (2017), SIMDA Keuangan memberikan hubungan positif secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Juga, (Swastika & Widhiyani, 2020) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah juga berpengaruh positif. Di satu sisi, penelitian yang telah dilakukan oleh Erviana (2017) menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan antara sistem informasi manajemen daerah dengan kualitas pelaporan keuangan. Terdapatnya perbedaan pada hasil penelitian ini maka hipotesis pertama pada penelitian ini adalah

H₁: SIMDA Keuangan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Semua ASN pastilah berlatar belakang pendidikan, tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan menjadikan seseorang lebih profesional dalam menangani permasalahan baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan sosial masyarakat. Penelitian dari Muzahid (2014), Marlina (2017), Wiraputra (2014), Wardani (2014), dan Maulia (2014) menunjukkan pengaruh positif yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan kemampuan kerjanya dalam menyampaikan laporan keuangan di organisasi pemerintahan maupun non pemerintahan.

Di satu sisi, hasil penelitian dari (Priyatna, 2015) menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan. Peneliti menduga tidak berpengaruh signifikan karena Pegawai Penatusahaan Keuangan (PPK) SKPD di Kabupaten Ngawi dan Pacitan yang memiliki latar belakang pendidikan murni akuntansi sangatlah minim. Bahkan di Kabupaten Pacitan hanya ada 2 pegawai saja yang berlatar belakang murni pendidikan akuntansi. Di kabupaten Ngawi tidak ada satupun Pejabat Penatusahaan Keuangan yang berlatar belakang murni pendidikan akuntansi. Hal inilah yang menjadi penyebab tidak berpengaruh signifikan tingkat pendidikan yang tinggi terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Karena meskipun memiliki tingkat pendidikan tinggi, tapi latar belakang pendidikannya bukanlah akuntansi murni. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis pengaruh tingkat pendidikan dengan kualitas laporan keuangan adalah: H₂: Tingkat Pendidikan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Kemampuan seseorang tidak hanya dapat diukur dari pendidikannya tetapi juga dapat diukur dari pengalaman kerja yang dimiliki karyawan tersebut. Pengalaman kerja juga memberikan penilaian yang cukup signifikan untuk menilai kemampuan seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya. Terutama untuk pekerjaan kompleks yang membutuhkan keterampilan khusus. Dengan pengalaman yang dimiliki pihak internal organisasi dalam menyiapkan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) akan memberikan masukan kepada pegawai-pegawai baru dalam menyiapkan laporan keuangan. Penguasaan secara teori maupun teknis dapat menyelesaikan tugas secara tepat waktu dan relevan. Tepat waktu dan relevan ini merupakan salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan. Dengan demikian, kombinasi pengalaman dan pendidikan akan memberikan nilai lebih terhadap kualitas pekerjaan atau tugas yang dilakukan dalam aktivitasnya.

Pengalaman merupakan guru terbaik dari cara pembelajaran bagi pihak internal untuk menjadikan pegawainya mampu menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh karyawan, maka semakin mahir karyawan tersebut dalam menguasai tugasnya sendiri maupun pekerjaan yang dikerjakannya. Dengan pengalamanpun karyawan bisa menghadapi dan menyelesaikan hambatan atau rintangan dalam menyelesaikan tugasnya.

Supratmi (2013) mengatakan dalam penelitiannya bahwa pengalaman kerja meningkatkan etos kerja. Semakin banyak pengalaman seseorang, semakin meningkat juga etos kerja dan kinerja yang baik pada akhirnya. (Herliansyah & Meifida, 2006) Melakukan penelitian pengaruh pengalaman auditor terhadap penggunaan bukti yang tidak relevan dalam pertimbangan

audit. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengalaman auditor memberikan dampak pada pemahamannya tentang bukti yang tidak relevan dalam pertimbangan audit. Priyatna (2015) mengatakan dalam penelitiannya bahwa pengalaman kerja berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Peneliti menduga hal ini terjadi karena ketika penelitian sedang berlangsung, Kabupaten Ngawi dan Pacitan sedang dimasa konvergensi dari PP No 24 tahun 2005 menuju PP No 71 tahun 2010. PP No 71 Tahun 2010 mula efektif dilaksanakan mulai tahun anggaran 2015. Kemungkinan besar yang terjadi adalah penjabat penatausahaan keuangan terlanjur terbiasa bekerja menggunakan SAP dari PP No 24 tahun 2005.

H₃: Pengalaman Kerja berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan data primer dengan kuesioner skala likert. Populasi dalam penelitian ini adalah ASN SKPK pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Menurut Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Jaya, total SKPK di Aceh Jaya berjumlah 43.

Pengambilan sampel pada penelitian berdasarkan *purposive sampling*, menggunakan karakteristik:

1. Dari keseluruhan populasi yang jadi sampel pada penelitian ini adalah Pegawai SKPK Aceh Jaya yang mempunyai jabatan sebagai Kasubbag Keuangan dan Pelaporan di setiap SKPK Aceh Jaya. Total pegawai sebanyak 43 orang.
2. Staf dari setiap Kasubbag Keuangan dan Pelaporan SKPK Aceh Jaya sebanyak minimal 1 orang per Kasubbag Keuangan dan Pelaporan. Maka total sampel diambil untuk staf sebanyak 43 orang.

Dari karakteristik tersebut, maka dapat diambil kesimpulan total sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 86 sampel.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dan dependen pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel operasional variabel berikut:

Tabel 1. Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala	Sumber
Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan	SIMDA adalah sistem manajemen informasi pemerintah daerah yang merupakan subsistem dari Sistem Informasi Manajemen Dalam Negeri (SIMDAGRI) yang mendukung kebutuhan informasi bagi penyelenggaraan fungsi utama dan penunjang bagi pemerintah daerah yang terintegrasi secara baik (Anwar, 2004).	1. Ketersediaan komputer 2. Tersedianya jaringan internet 3. Tersedianya software 4. Sistem akuntansi SKPKD 5. Pelatihan penggunaan SIMDA	Likert	Gunaidi (2017)

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala	Sumber
Pengalaman Kerja	Kemampuan seseorang dalam menyelesaikan tugas-tugasnya di masa lalu sehingga mempermudah memecahkan berbagai masalah yang diselesaikannya sehingga menimbulkan rasa kepercayaan dalam menyusun laporan keuangan yang baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka waktu bekerja 2. Bidang pengalaman kerja 3. Manfaat pengalaman kerja 	Likert	Muzahid (2014)
Tingkat Pendidikan	Tingkat pendidikan adalah suatu proses jangka panjang yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir, yang mana tenaga kerja manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan-tujuan umum (Wiguna, 2016).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Latar belakang pendidikan 2. Strata pendidikan 3. Pendidikan dilakukan secara periodik 	Likert	Muzahid (2014)
Kualitas Laporan Keuangan	Merupakan ukuran-ukuran yang dibuat dalam bentuk informasi akuntansi sehingga dapat mencapai tujuannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai nilai yang relevan 2. Mempunyai nilai keterandalan 3. Dapat diperbandingkan 4. Dapat dipahami dengan baik oleh pemakai informasi 5. Penyajian dengan jujur 6. Ketepatan Waktu 7. Penyajian dengan jujur 	Likert	Gunaidi, (2017)

Sumber: Data diolah, 2021

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengujian validitas pada kuesioner penelitian ini menggunakan uji koefisien korelasi *product moment* dengan nilai signifikansi 0,05 atau sebesar 5%. Item setiap pertanyaan dinyatakan valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, begitu juga sebaliknya jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka dinyatakan tidak valid. Hasil pengujian validitas untuk setiap item pertanyaan berdasarkan jawaban dari 86 sampel menunjukkan nilai yang valid karena semua $r_{hitung} > r_{tabel}$. R tabel pada penelitian ini adalah 0,2096. Berikut ini adalah hasil uji validitas yang diperoleh:

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

No	Item Pertanyaan	Variabel	Koefisien Korelasi (R_{hitung})	Sig.	Ket.
1	X1.1		0,592	0,000	Valid
2	X1.2		0,628	0,000	Valid
3	X1.3		0,640	0,000	Valid
4	X1.4		0,589	0,000	Valid
5	X1.5	SIMDA Keuangan (X1)	0,726	0,000	Valid
6	X1.6		0,582	0,000	Valid
7	X1.7		0,676	0,000	Valid
8	X1.8		0,620	0,000	Valid
9	X1.9		0,614	0,000	Valid
10	X1.10		0,592	0,000	Valid
11	X2.1			0,614	0,000
12	X2.2		0,579	0,000	Valid
13	X2.3	Tingkat Pendidikan (X2)	0,527	0,000	Valid
14	X2.4		0,548	0,000	Valid
15	X2.5		0,636	0,000	Valid
16	X2.6		0,537	0,000	Valid
17	X2.7		0,507	0,000	Valid
18	X3.1		0,495	0,000	Valid
19	X3.2		0,518	0,000	Valid
20	X3.3		0,593	0,000	Valid
21	X3.4		0,600	0,000	Valid
22	X3.5	Pengalaman Kerja (X3)	0,285	0,008	Valid
23	X3.6		0,566	0,000	Valid
24	X3.7		0,286	0,007	Valid
25	X3.8		0,515	0,000	Valid
26	X3.9		0,522	0,000	Valid
27	X3.10		0,614	0,000	Valid
28	Y.1		0,491	0,000	Valid
29	Y.2		0,400	0,000	Valid
30	Y.3		0,431	0,000	Valid
31	Y.4		0,358	0,001	Valid
32	Y.5		0,524	0,000	Valid
33	Y.6	Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)	0,525	0,000	Valid
34	Y.7		0,437	0,000	Valid
35	Y.8		0,548	0,000	Valid
36	Y.9		0,585	0,000	Valid
37	Y.10		0,501	0,000	Valid
38	Y.11		0,515	0,000	Valid
39	Y.12		0,577	0,000	Valid
40	Y.13		0,444	0,000	Valid

Sumber: Data diolah, 2021

Pengujian reliabilitas terhadap kuesioner dapat dilaksanakan setelah uji validitas dilakukan. Hasil uji reabilitas dengan menggunakan teknik *cronbach alpha* dapat dilihat pada tabel 3. Nilai di atas 0.6 maka dapat dikatakan reliabel.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item Pernyataan	Cronbach Alpha	Ket.
SIMDA Keuangan (X1)	10	0,825	Reliabel
Tingkat Pendidikan (X2)	7	0,624	Reliabel
Pengalaman Kerja (X3)	10	0,656	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)	13	0,732	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2021

Karakteristik Responden

Pada penelitian karakteristik diolah dengan analisis statistik deskriptif untuk mengetahui karakteristik responden. Distribusi responden ditinjau dari jenis kelamin, usia, jenjang pendidikan, dan lama bekerja. Klasifikasi yang dilakukan terhadap responden dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai data karakteristik dari responden. Data responden disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. Data Responden

No.	Karakteristik	Frekuensi	Persentase
1.	Jenis Kelamin		
	a. Pria	72	82,8
	b. Perempuan	15	17,4
2.	Usia		
	a. 21-30 Tahun	13	15,0
	b. 31-40 Tahun	65	74,7
	c. 41-50 Tahun	7	8,0
	d. > 50 Tahun	2	2,3
3.	Jenjang Pendidikan		
	a. SMA	6	7,0
	b. D3	15	17,2
	c. S1	62	71,3
	d. S2	3	3,4
	e. S3	1	1,1
4.	Lama Bekerja		
	a. 1-3 Tahun	5	5,7
	b. 4-5 Tahun	2	2,3
	c. 10-20 Tahun	75	86,2
	d. 20-50 Tahun	5	5,8
	Total	86	100

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan data pada tabel 4, jenis kelamin yang diambil sebagai responden terdiri dari pria sebanyak 72 orang atau 82,8%, sedangkan sisanya adalah wanita yang berjumlah

15 orang atau 17,2%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar yang menjadi responden yang menjadi objek penelitian adalah pria. Usia dari responden terdiri dari usia 21-30 tahun berjumlah 13 orang atau 15%, usia 31-40 tahun berjumlah 65 orang atau 74,7%, usia 41-50 7 orang atau 8,0%, dan >50 tahun berjumlah 2 orang atau 2,3%. Jenjang pendidikan yang terdiri dari SMA adalah sebanyak 6 responden atau 7,0%, jenjang pendidikan D3 sebanyak 15 responden atau 17,3%, jenjang pendidikan S1 sebanyak 61 responden atau 71,3%, jenjang pendidikan S2 sebanyak 3 responden atau 3,4%, dan jenjang pendidikan S3 sebanyak 1 responden atau 1,1%. Lama bekerja responden terdiri dari 1-3 tahun adalah sebanyak 5 responden atau 5,7%, 4-5 tahun sebanyak 2 responden atau 2,3%, 10-20 tahun sebanyak 75 responden atau 86,2%, dan 20-50 tahun sebanyak 5 responden atau 5,7%.

Hasil Analisis Data

Penelitian menggunakan analisis regresi linear berganda, sebelum dilakukan analisis regresi berganda, sebelumnya dilakukan pengujian asumsi klasik, berupa uji normalitas, uji multikolinearitas dan heterokedastisitas.

Pengujian normalitas pada penelitian ini dilakukan dengan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* dengan melihat tingkat signifikasinya. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5% maka data dapat dikatakan terdistribusi normal dan begitu pula sebaliknya jika lebih kecil dari 0,05 atau 5% maka data tidak terdistribusi secara normal. Hasil uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Uji Statistik Kolomogorov-Smirnov

	Unstandardized Residual
N	86
Mean	.00000
Test Statistic	.049
Sig.	.200

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan data pada tabel 5 diketahui bahwa nilai signifikansi (*Asymp. Sig. 2-tailed*) yang diperoleh berdasarkan uji statistik di atas adalah sebesar 0,200. Hal ini menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal karena nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikasinya yaitu sebesar 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa residual data terdistribusi secara normal dan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

Model regresi yang baik merupakan model yang didalamnya tidak terdapat multikolinearitas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model ini dapat dilihat dengan cara meninjau nilai *tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila Nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka tidak terdapat multikolinearitas. Sebaliknya, apabila nilai *tolerance* 0,10 dan nilai VIF > 10 maka terdapat multikolinearitas. Berikut adalah hasil uji mutikolinearitas:

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
SIMDA Keuangan	0,976	1,025
Tingkat Pendidikan	0,981	1,020
Pengalaman Kerja	0,984	1,016

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan data pada tabel 6, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai dari *tolerance* >0,10 dan Nilai VIF <10.

Pada penelitian ini, untuk pengujian heterokedastisitas menggunakan uji *glejser*. Pada uji *glejser*, apabila nilai signifikan menunjukkan nilai diatas 5% atau 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas, demikian sebaliknya. Hasil uji *glejser* dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini.

Tabel 7. Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Sig.
SIMDA Keuangan	0,488
Tingkat Pendidikan	0,806
Pengalaman Kerja	0,953

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel 7, keseluruhan variabel pada model regresi menunjukkan signifikansi diatas 0,05, maka model regresi pada penelitian ini tidak terdapatnya heteroskedastisitas.

Hasil Metode Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil dari analisis regresi linear berganda secara simultan dan parsial dapat dilihat secara jelas pada Tabel 8 dan Tabel 9.

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	F	Sig
1	0,332	0,110	0,078	3,07079	3,427	0,021

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan perhitungan statistik yang disajikan pada Tabel 8, maka hasil nilai F signifikan 0,021 dan R-Square yang rendah sebesar 0,110 yang berarti kualitas laporan keuangan di Kabupaten Aceh Jaya hanya 11% dipengaruhi oleh variabel-variabel pada penelitian ini, 89% di pengaruhi oleh variabel di luar penelitian ini.

Tabel 9. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel Independent	B	S.E.	Beta	t	Sig
SIMDA Keuangan	-.054	0.86	-.065	-.619	.538
Tingkat Pendidikan	.022	.114	.021	.196	.845
Pengalaman Kerja	.313	.098	.333	3.193	.002

Sumber: Data diolah, 2021

Hasil uji partial untuk persamaan regresi linear berganda tersebut adalah sebagai berikut:

$$Y = 46,716 - 0,054X_1 + 0,022X_2 + 0,313X_3 + e$$

Pengaruh SIMDA Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan pada hasil analisis regresi linear berganda, nilai koefisien regresi yang diperoleh sebesar -0,054, hal ini menunjukkan bahwa SIMDA Keuangan belum dapat memberikan kontribusi untuk mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Pada hasil pengujian statistik juga dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel SIMDA Keuangan adalah sebesar -0,619 yang lebih kecil dari nilai t_{tabel} yaitu sebesar 1,66. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa SIMDA Keuangan tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah SKPK di Kabupaten Aceh Jaya, dan hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Tidak signifikannya hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Erviana (2017), yang menemukan bahwa implementasi sistem informasi manajemen daerah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh negatif yang tidak signifikan ini, mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap SIMDA yang selama ini digunakan pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Hasil wawancara dengan beberapa pegawai, menunjukkan bahwa masih banyak kendala dalam menggunakan SIMDA, terutama pelaksanaan teknisnya membutuhkan banyak waktu dalam menyamakan saldo akhir dan memperbaiki kesalahan posting, Saat ini, pihak BPKP yang mengeluarkan SIMDA sedang mengadakan perbaikan pada SIMDA dengan mengeluarkan update besar-besaran dengan mengeluarkan SIMDA Next-G yang bernama FMIS (*Financial Management Information System*) (bpkp.go.id, 2019).

Di satu sisi, beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh telah menggunakan SIPD yang dikeluarkan oleh KEMENDAGRI. Menteri Dalam Negeri RI memberlakukan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Perbaikan teknologi informasi yang dilakukan secara terus menerus yang menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan *stakeholder* memberikan kontribusi berupa sistem pengolahan data dan informasi pengelolaan pelaporan data keuangan. Oleh karenanya, diperlukan sistem informasi yang terintegrasi, dapat diandalkan, cepat dan akurat sehingga sistem yang terintegrasi secara menyeluruh dapat menghasilkan informasi yang andal dan relevan serta menjalankannya secara efektif dan efisien.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Gunadi (2017) yang menghasilkan bahwa SIMDA Keuangan memberikan pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Swastika & Widhiyani (2020) mengatakan dalam penelitiannya bahwa Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan berpengaruh positif.

Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan pada hasil analisis regresi linear berganda, nilai koefisien regresi yang diperoleh sebesar 0,022, hal ini menunjukkan Tingkat Pendidikan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah sebesar 2,2%, namun hasil penelitian ini belum dapat di generalisir karena tidak signifikan dimana nilai t_{hitung} untuk variabel tingkat pendidikan adalah sebesar 0,196 yang lebih kecil dari nilai t_{tabel} yaitu sebesar 1,66. Tidak signifikan variabel tingkat pendidikan dikarenakan hanya 39% responden berlatar belakang akuntansi, selebihnya non akuntansi. Pada saat pengoperasian SIMDA mereka sangat sering menelfon operator SIMDA apabila terjadi kendala teknis, yang berarti sangat banyak membuang waktu dalam pelaksanaannya.

Tidak signifikannya variabel tingkat pendidikan sejalan dengan hasil penelitian Priyatna (2015) yang juga menemukan bahwa tingkat Pendidikan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian dari Muzahid (2014), Marlina (2017), Wiraputra (2014), Wardani (2014), dan Maulia (2014) yang sama-sama menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pengaruh Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Pengaruh Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan pada hasil analisis regresi linear berganda, nilai koefisien regresi yang diperoleh sebesar 0,313, hal ini menunjukkan Pengalaman Kerja dapat memberikan kontribusi untuk mempengaruhi pengambilan Kualitas Laporan Keuangan Daerah sebesar 31,3%. Pada hasil pengujian statistik juga dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel Pengalaman Kerja adalah sebesar 3,193 yang lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu sebesar 1,66. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pengalaman Kerja berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah SKPK di kabupaten Aceh Jaya, dan hal ini sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.

Supratmi (2013) mengatakan dalam penelitiannya bahwa pengalaman kerja meningkatkan etos kerja. Semakin baik pengalaman seseorang maka akan semakin baik etos kerja yang dimiliki dan akhirnya akan mempunyai kinerja yang baik pula. Herliansyah & Meifida (2006) melakukan penelitian tentang pengaruh pengalaman auditor terhadap penggunaan bukti tidak relevan dalam *audit judgement*. Hasil penelitiannya menemukan bahwa pengalaman auditor mempunyai pengaruh terhadap pemahamannya terhadap bukti tidak relevan dalam *audit judgement*. Priyatna (2015) mengatakan dalam penelitiannya bahwa pengalaman kerja berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

SIMPULAN

Laporan pemerintah Kabupaten Aceh Jaya memperoleh predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang berarti kualitas laporan keuangannya bagus, namun predikat ini diperoleh bukan dikarenakan faktor penggunaan SIMDA dan tingkat pendidikan. Pada penelitian ini, kualitas laporan keuangan Kabupaten Aceh Jaya ini dipengaruhi oleh variabel pengalaman kerja, dengan nilai R-Squarenya sebesar 0,11 yang berarti 0,89 ditentukan oleh faktor-faktor lain diluar variabel penelitian ini. Hasil wawancara juga menunjukkan banyak kendala dalam mengaplikasikan SIMDA.

Pada penelitian ini nilai R-Square masih kecil, akan tetapi Kabupaten Aceh Jaya telah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian secara berturut-turut, maka pada penelitian selanjutnya peneliti dapat menambahkan variabel transparansi dan akuntabilitas. Selain penambahan variabel transparansi dan akuntabilitas, juga dapat meneliti pada kabupaten/kota yang telah menggunakan SIPD dalam menyampaikan laporan keuangannya untuk menganalisis sejauh mana kendala-kendala yang ditemukan pada SIPD, sebagai dasar perbandingan dengan SIMDA.

PUSTAKA ACUAN

- Acehjayakab.go.id. (2021). *Aceh jaya raih wtp ke-8 dari bpk-ri perwakilan aceh*. <http://www.acehjayakab.go.id/berita/kategori/pemerintahan/aceh-jaya-raih-wtp-ke-8-dari-bpk-ri-perwakilan-aceh>
- Acehprov.go.id. (2018). Kabupaten aceh jaya urutan ke 3 tercepat menyerahkan laporan keuangan BPK RI. *Acehprov.Go.Id*. <https://acehprov.go.id/berita/kategori/pemerintahan/kabupaten-aceh-jaya-urutan-ke-3-tercepat-menyerahkan-laporan-keuangan>
- Anggadini, D. S., Bramasto, A., & Aulia, S. (2021). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Dampak Dari Sistem Pengendalian Intern Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi UNIBBA*, 12(2), 165–178.
- Anwar M, K., & Oetojo S, A. (2004). *Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintahan di Era Otonomi Daerah SIMDA*. Pustaka Pelajar.
- Bpk.go.id. (2011). 91% laporan keuangan pemda buruk. *Bpk.Go.Id*. <https://www.bpk.go.id/news/91-laporan-keuangan-pemda-buruk>
- bpkp.go.id. (2019). Sejarah simda. *Bpkp.Go.Id*. <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/334/sejarah-simda.bpkp>
- Budiman, F., & Arza, F. I. (2013). Pendekatan Technology Acceptance Model dalam Kesuksesan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah. *Jurnal WRA*, 1(1), 86–110.
- Defitri, Y. S. (2016). Pengaruh Pemahaman Akuntansi Dan Pemanfaatan Keuangan Pemerintah Daerah. *National Conference of Applied Sciences, Engineering, Business and Information Technology*, 309–314.
- Erviana. (2017). Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Dan Kegiatan Pengendalian Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survey Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Kota Palu). *Jurnal Katalogis*, 5(4), 182–193.

- Foster, B. (2001). *Pembinaan Untuk Peningkatan Kinerja Karyawan*. PPM.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunadi, E. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gowa). *Skripsi*, 1–15. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/13058>
- Herliansyah, Y., & Meifida, I. (2006). Pengaruh Pengalaman Auditor Terhadap Penggunaan Bukti Tidak Relevan Dalam Auditor Judgement. *SNA IX Padang*.
- Kemendagri.go.id. (2019). Kemendagri luncurkan sistem informasi pemerintahan daerah. *Kemendagri.Go.Id*. <https://www.kemendagri.go.id/berita/baca/24443/kemendagri-luncurkan-sistem-informasi-pemerintahan-daerah>
- Machmud, R. (2013). Relationship Management Information Systems and Services with Employee Performance at Rutan Makassar. *Jurnal Capacity STIE AMKOP Makassar*, 1(9), 78–85.
- Marlina, L. (2017). Pengaruh Pengalaman Kerja, Pelatihan, Tingkat Pendidikan Dan Kecanggihan Teknologi Informasi Terhadap Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi. In *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Maulia, S. T. (2014). Pengaruh Usia, Pengalaman dan Pendidikan Dewan Komisaris Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. In *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Muzahid, M. (2014). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, dan Lama Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD ACEH UTARA. *Jurnal Akuntansi*, 2(2), 179–196. <https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JA/article/view/2174>
- Priyatna, B. H. (2015). Pengaruh pemahaman akuntansi, tingkat pendidikan, dan pengalaman kerja pejabat penatausahaan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah: studi kasus pada kabupaten ngawi dan kabupaten pacitan. In *Skripsi*. universitas sebelas maret surakarta.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A skill building approach*. John Wiley & Sons. Jhon Wiley & Sons.
- Supratmi. (2013). Pengaruh Tingkat Kompetensi dan Pengalaman Kerja Terhadap Etos Kerja (Studi Kasus Guru Bersertifikasi di SMA Negeri 14 Semarang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Unpand*, 6(1), 1–11.
- Swastika, I. B. P. J., & Widhiyani, S. N. L. (2020). Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah, Good Governance dan Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Jembrana. *Jurnal Akuntansi*, 30(11), 2724. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i11.p02>
- Tegela, R. (2014). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Darah. In *Skripsi*. Universitas Negeri Gorontalo.
- Wardani, R. N. (2014). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja, Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Kementerian Agama Kota Makassar*. 1–113.

- Wiraputra, W. K. (2014). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Latar Belakang Pendidikan terhadap Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal Universitas : Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program*, 2(1).
- Wungow, J. ., Lambey, L., & Pontoh, W. (2016). Pengaruh tingkat pendidikan, masa kerja, pelatihan dan jabatan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten minahasa selatan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 174–188.
- Yovanda, y. R. (2021). Menkeu: kualitas laporan keuangan pemda membaik, 89 persen dapat opini wtp. *Tribunnews.Com*.
- <https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/09/14/menkeu-kualitas-laporan-keuangan-pemda-membaik-89-persen-dap>